

Implikasi Geopolitik Jangka Panjang: *Retrenchment* AS, Kebangkitan Iran, dan Percepatan Multipolaritas

suryawiranto.id

Bukan sekadar “*kerusakan infrastruktur*” yang dapat diperbaiki dalam hitungan bulan. Yang terjadi di Timur Tengah adalah disrupsi strategis sistemik terhadap arsitektur keamanan Amerika Serikat di kawasan, sebuah pukulan yang mengubah kalkulasi kekuasaan regional dan global secara fundamental. Analisis doktoral harus melampaui daftar kerusakan fisik dan memasuki wilayah yang lebih dalam: bagaimana peristiwa ini mempercepat *retrenchment* AS, merevitalisasi Iran sebagai aktor revisionis utama, menggoyahkan kepercayaan sekutu, dan memperkokoh tren multipolaritas yang sudah tak terbendung.

Pertama, erosi kredibilitas jaminan keamanan AS dan fragmentasi aliansi regional. *Forward bases* yang selama ini menjadi simbol komitmen Washington kini berubah menjadi *liability* politik dan militer. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Qatar, negara-negara yang mengandalkan “*payung*” AS untuk bertahan dari ancaman Iran, kini menghadapi realitas pahit: superioritas teknologi dan kehadiran militer Amerika tidak lagi menjamin perlindungan. Ketika Prince Sultan dan Al Udeid lumpuh, sekutu GCC (*Gulf Cooperation Council*) tidak hanya kehilangan rasa aman; mereka juga kehilangan alasan untuk terus membiayai kehadiran AS yang semakin mahal dan rentan.

Implikasi langsungnya adalah diversifikasi strategi keamanan. Riyadh dan Abu Dhabi kemungkinan besar akan mempercepat normalisasi dengan Iran (atau setidaknya de-eskalasi diam-diam), memperdalam hubungan dengan China melalui *Belt and Road*, dan bahkan mempertimbangkan opsi nuklir sipil yang dapat dikonversi. Israel, yang selama ini mengandalkan koordinasi udara AS, kini menghadapi kalkulasi baru: apakah Washington masih mampu menjadi *ultimate backstop*? Keretakan dalam koalisi anti-Iran yang rapuh ini bukan lagi skenario hipotetis; ia adalah konsekuensi logis dari *vulnerability exposure* yang terpampang di layar satelit.

Kedua, kebangkitan Iran sebagai *pivotal revisionist power* di Eurasia. Iran tidak hanya membuktikan kemampuan *anti-akses/area denial* (A2/AD) yang canggih; ia berhasil mengubah narasi strategis dari “*negara paria*” menjadi “*aktor yang mampu menghukum superpower*”. Dengan menargetkan secara simultan *node*, *network*, dan *sustainment*, Teheran menunjukkan pemahaman mendalam tentang *network-centric warfare*, bukan dengan kekuatan konvensional yang sepadan, melainkan dengan kombinasi rudal balistik presisi, *drone swarm*, dan *proxy* yang terkalibrasi.

Ini adalah titik balik doktrinal. Doktrin “*maximum pressure*” AS pasca-2018 kini terbalik: tekanan maksimal justru memperkuat ketahanan Iran dan membuka ruang bagi *axis of resistance* (Houthi, Hezbollah, milisi Irak-Suriah) untuk beroperasi dengan lebih percaya diri. Dalam jangka menengah, Iran dapat memanfaatkan momentum ini untuk mempercepat program nuklirnya, bukan untuk senjata atom langsung, melainkan untuk *nuclear latency* yang memberikan *leverage* diplomatik dan *deterrence* yang tak terbantahkan. Multipolaritas tidak lagi teori; ia kini memiliki wajah konkret di Teluk Persia.

Ketiga, dampak riak terhadap rivalitas besar kekuatan (US-China-Russia) dan stabilitas energi global. Keruntuhan ekosistem militer AS di Timur Tengah secara otomatis mengalihkan perhatian dan sumber daya Washington dari Indo-Pasifik. *Pivot to Asia* yang sudah terlambat kini terancam *strategic overstretch*. Beijing dan Moskow, dua aktor yang secara terbuka mendukung narasi “*penolakan hegemoni*”, akan melihat peluang untuk mengisi kekosongan. China dapat mempercepat penetrasi ekonomi di GCC melalui investasi pasca-kerusakan, sementara Rusia semakin memperkuat posisinya sebagai pemasok senjata dan energi alternatif.

Dimensi energi tak kalah krusial. Gangguan *sustainment* logistik di pelabuhan Duqm, Jebel Ali, dan Armada Kelima Bahrain berpotensi menciptakan *oil shock* jangka pendek. Meski produksi minyak tidak langsung terhenti, ketidakpastian keamanan maritim di Selat Hormuz dan Teluk Persia sudah cukup untuk mendorong harga Brent naik tajam, dampak inflasi global yang akan dirasakan dari Jakarta hingga Washington. Negara-negara importir energi seperti Indonesia dan India kini dihadapkan pada pilihan sulit: tetap bergantung pada jalur tradisional atau mempercepat diversifikasi ke Rusia dan Iran.

Keempat, perubahan paradigma perang dan abadiisasi “*grey zone*” sipil-militer. Serangan terhadap fasilitas *dual-use* (bandara sipil, node urban) menandai perluasan domain konflik ke wilayah yang selama ini dianggap tabu. Ini bukan lagi perang antar-negara dalam pengertian klasik *Westphalian*; ini adalah *hybrid warfare* yang mengaburkan batas antara kombatan dan non-kombatan. Implikasinya bagi tata kelola global adalah erosi norma-norma perang konvensional yang sudah rapuh, membuka preseden bagi aktor lain (China di Laut China Selatan, Rusia di Arktik) untuk mengadopsi strategi serupa dengan biaya rendah dan *deniability* tinggi.

Kesimpulan Reflektif Dalam kerangka teori hubungan internasional pasca-hegemoni (seperti yang dikemukakan John Mearsheimer maupun Barry Posen), peristiwa ini adalah manifestasi empiris dari *offshore balancing* yang gagal. Amerika Serikat, yang selama ini mengandalkan “*over-the-horizon*” *presence* sebagai alat kontrol murah, kini dihadapkan pada pilihan pahit: *recommitment* dengan biaya triliunan dolar yang tak populer secara domestik, atau *retrenchment* yang terpaksa, yang pada gilirannya mempercepat transisi menuju dunia multipolar yang lebih *chaotic* namun lebih realistis.

Yang hancur bukan hanya beton di Al Udeid atau radar di Qatar. Yang hancur adalah mitos bahwa hegemoni unilateral dapat dipertahankan dengan teknologi semata, tanpa legitimasi politik dan kalkulasi biaya-manfaat yang jujur. Bagi Indonesia dan negara-negara Global South lainnya, pelajaran ini jelas: di era di mana *superpower* pun rentan, kemandirian strategis dan diversifikasi kemitraan bukan lagi pilihan—melainkan keharusan eksistensial.